



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

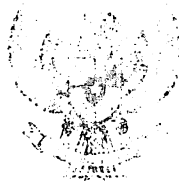
NOMOR : HK.02.02/MENKES/584/2016

TENTANG  
PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN  
DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KE TUJUH BELAS  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Tujuh Belas Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang ...



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : HK.02.02/MENKES/SK/2016

TENTANG  
PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN  
DOKTER SPESIALIS ANKATAN KE TUJUH BELAS  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medis spesialistik perlu dilaksanakan program bantuan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantarnya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
  - b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang berambisi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemilihan Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Tujuh Belas Tahun 2016;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang ...



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Negara (Lampiran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  
Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Laporan Negara  
Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik  
Kedokteran (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 116, Tambahan Laporan Negara Republik  
Indonesia Nomor 4431);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 144, Tambahan Laporan Negara Republik  
Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah  
Sakit (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 133, Tambahan Laporan Negara Republik  
Indonesia Nomor 5072);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Laporan Negara  
Republik Indonesia Nomor 4494);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Laporan  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana  
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2015 (Lampiran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Laporan Negara  
Republik Indonesia Nomor 5679);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153)
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

18. Keputusan Menteri ...



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

3

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4190);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MEK/2011 tentang (a) Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kebidanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 671);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpadu, Sangat Terpadu dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak dirintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penguasaan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
18. Keputusan Menteri ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4

Memperhatikan :

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Nomor 1728/UN2.F2.D1/PDP.00.01.Seleksi Mahasiswa/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Hasil Seleksi Akademik penerima Bantuan PPDS-BK Angkatan XVII Tahun 2015
2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Nomor 6194/UN6.F1/PP/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Seleksi Mahasiswa Baru PPDGS FKG UNPAD T.A. 2016/2017
3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Nomor 686/UN12.1/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Usulan Calon Peserta Penerima Beasiswa Kementerian Kesehatan Angkatan XVI
4. Surat Ketua TKP-PPDS-I Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor 116/UN.14.2/B.TKPPDSI/I/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Daftar Nama Peserta BK Angk. XVII Th. 2016
5. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor 4636/UN6.C/KM/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Penetapan Calon Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gelombang I Tahun Akademik 2016/2017 (Periode September 2016) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran
6. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor 1027/UN5.2.1.1/SDM/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Daftar Nama Peserta Tubel Kemenkes RI Penerimaan PPDS-BK Periode Maret 2016
7. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 7657/UN27.06/DP/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengusulan peserta PPDSBK Kemenkes RI

8. Surat Dekan ...



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.03/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Nomor 178/UN2.F2.D1/PD2.00.01.2/Seleksi Mahasiswa\2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Hasil Seleksi Akademik penerima Bantuan PPD2-BK Angkasan XVII Tahun 2015
2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Nomor 6194/UN6.F1/PP/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pembentukan Hasil Seleksi Mahasiswa Baru PPD2 BK UNPAD TA. 2016\2017
3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Nomor 086/UN12.1\2015 tanggal 11 Mei 2016 tentang Usulan Calon Peserta Penerima Beasiswa Kementerian Kesehatan Angkasan XVI
4. Surat Ketua TKP-PPD2-1 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor 116/UN14.2/R.TKPPD2/1\VI\2015 tanggal 15 Juni 2016 tentang Daftar Nama Peserta BK Angk. XVII Th. 2016
5. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor 4886/UN6.C/KM\2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Penetapan Calon Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gendang 1 Tahun Akademik 2016\2017 (Periode September 2016) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran
6. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor 1027/UN5.2.1.1\SDM\2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Daftar Nama Peserta Turun Kemendes RI Perumahan PPD2-BK Periode Maret 2016
7. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 7657/UN27.06\DP\2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengusulan peserta PPD2BK Kemendes RI
8. Surat Dekan ...

Memperhatikan :





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5

8. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor 2405/UN3.1.1/PPd.6/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Calon Penerima Beasiswa Tubel Kemkes Angkatan ke XVII
9. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 07076/UN10.7/AK/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pemberitahuan Lulus Tes Seleksi PS PDS BK
10. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 8689/UN27.06/DP/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Tambahan Pengusulan peserta PPDSBK Kemenkes RI
11. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 8549/UN7.3.4/D/PP/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru PPDS-BK Kemenkes
12. Surat Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Nomor PPDS/8369/I/03/04/07.16 tanggal 25 Juli 2016 tentang Hasil Seleksi Akademik Tubel PPDS Kemenkes Angkatan XVII – Juli 2016
13. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor 3737/UN11.1.17/DT/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Hasil Seleksi Akademik penerima Bantuan PPDS-BK Angkatan XVII Tahun 2016
14. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Nomor 3420/UN3.1.2/PPd/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pemberitahuan Peserta Lulus Seleksi Angkatan XVI dan XVII PPDGS FKG UNAIR
15. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor 8892/UN2.F1.D/PDP.00/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Penyampaian Nama Peserta Tubel Kemenkes Angkatan XVII

16. Surat Dekan ...



8. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor 3405/UN3.1.1/Pfd/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Calon Peserta Beasiswa Tubel Kemkes Angkatan ke XVII
9. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 07076/UM107/AK/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pembentukan Lulus Tes Seleksi PDS BK
10. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor 8839/UN37.06/DP/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Tambahan Pengisian peserta PPTSBK Kemkes RI
11. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 8549/UN7.3.4/DP/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penentuan Mahasiswa from PDS-BK Kemkes
12. Surat Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengabdian Masyarakat dan Kejasama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Nomor PPD8/8359/1/03/04/07.16 tanggal 25 Juli 2016 tentang Hasil Seleksi Akademik Tubel PDS Kemkes Angkatan XVII - Juli 2016
13. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor 3737/UN11.11/DT/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Hasil Seleksi Akademik penerima Bantuan PPD8-BK Angkatan XVII tahun 2016
14. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Nomor 3420/UN3.1.2/Pfd/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pembentukan Peserta Lulus Seleksi Angkatan XVI dan XVII PPD8 PKG UNAIR
15. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor 8892/UM2.F1.D/DP.00/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Penetapan Nama Peserta Tubel Kemkes Angkatan XVII

16. Surat Dekan ...



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6

16. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor 4598/UN9.1.4.1/PPDS/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Usulan Peserta Tubel Kemenkes RI Angkatan XVII
17. Surat Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Nomor B/1979/10/08/02/DJKUAT tanggal 1 Agustus 2016 tentang Usulan nama peserta tugas belajar Kemhan untuk mendapatkan bantuan pendidikan dari Kemenkes
18. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 7107/UN4.6.2/PP.17/2017 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Penyampaian Hasil Seleksi PPDS Bantuan Beasiswa Berbasis Kompetensi dilingkungan Kementerian Kesehatan Periode Juli 2016
19. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Nomor 1872/UN2.F2.D/PDP.02.01.03. Kerjasama/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Lulus Seleksi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
20. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 8529/UN16.2.D/PP-PPDS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Laporan Data Peserta PPDS Tubel
21. Surat Dekan/Penanggungjawab Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Nomor 6885/J.01.1.21 /PP.Spl/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Nama-nama Mhs Tubel Lulus Seleksi PPDGS FKG-UGM
22. Surat Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/4493/IX/2016/Pusdokkes tanggal 9 September 2016 tentang permohonan bantuan biaya pendidikan bagi peserta program PPDS dan PPDGS

MEMUTUSKAN ...



AGENCI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Shriwijaya Nomor 4598\UN9.1.4.1\PPDS\2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Usulan Peserta Tabel Kemendes RI Angkatan XVII
- 17. Surat Direktur Jenderal Kesehatan Perikanan Nomor B\1979\10\08\02\DUKUT tanggal 1 Agustus 2016 tentang Usulan nama peserta tugas belajar Kemhan untuk mendapatkan bantuan pendidikan dari Kemendes
- 18. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin Nomor 7107\UN4.6.2\PP17\2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Pengumuman Hasil Seleksi PPDS Bantuan Beasiswa Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Kesehatan Periode Juli 2016
- 19. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Nomor 1873\UN2.F.1.D\PPD.02.01.03. Kojasams\2016 tanggal 13 Agustus 2016 tentang Intis Seleksi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
- 20. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 8232\UN16.2.D\PP-PPDS\2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Laporan Data Peserta PPDS Tabel
- 21. Surat Dekan/Panggunjawab Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Nomor 6885\U.01.1.21 \PP.Spl\2016 tanggal 7 September 2016 tentang Nama-nama Mine Tabel Intis Seleksi PPDS PRG-UGM
- 22. Surat Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B\4493\IX\2016\Pradokes tanggal 9 September 2016 tentang permohonan bantuan biaya pendidikan bagi peserta program PPDS dan PPDS

MEMUTUSKAN ..



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KE TUJUH BELAS TAHUN 2016
- KESATU : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis angkatan ketujuh belas tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Juli 2016.
- KETIGA : Masa pendidikan peserta Program Pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran dihitung sejak tanggal 1 Juli 2016.
- KEEMPAT : Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

7

MEMUTUSKAN :

- 1. Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERFORMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR SPESIALIS/DOKTOR GIGI SPESIALIS ANGGARAN KE TUJUH BELAS TAHUN 2016
- 2. Dalam pelaksanaannya bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sngkasat kejuruh pada tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- 3. Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Kesatu berupa biaya pendidikan yang dibebankan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Juli 2016.
- 4. Masa pendidikan peserta program Pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana tercantum dalam lampiran terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016.
- 5. Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan diselaraskan dengan kondisi keuangan negara.
- 6. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

129

NILA FARID AKBAR

- Tempat :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  2. Menteri Keuangan di Jakarta;
  3. Menteri Pertahanan di Jakarta;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8

4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
9. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta;
10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
13. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
15. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
16. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
17. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan selaku Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS di Jakarta;
18. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Jakarta;
19. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
20. Ketua Umum PB IDI di Jakarta;
21. Ketua Umum PB PDGI di Jakarta;
22. Ketua Pokja PPDS-BK Pusat di Jakarta;
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
25. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
26. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
27. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
28. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
29. Bendahara Pengeluaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan di Jakarta;
30. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



REKAM MEDIS  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Menteri Negara Pemberdayaan Manusia dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
5. Panglima TNI Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
9. Ketua Komisi Kedokteran Indonesia di Jakarta;
10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
13. Kepala Badan PSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
15. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Difusi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
16. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
17. Kepala Pusat PenINGKATAN Mutu SDM Kesehatan selaku Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola Program Garuda PSDM di Jakarta;
18. Kepala Pusat Perencanaan dan Penganggaran SDM Kesehatan di Jakarta;
19. Kepala Biro Kepegawaian Selanjutnya Kementerian Kesehatan di Jakarta;
20. Ketua Umum PB I di Jakarta;
21. Ketua Umum PB I di Jakarta;
22. Ketua Pojok PPS-IR di Jakarta;
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perencanaan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
24. Kepala Kantor Pelayanan Perencanaan Negara Jakarta V di Jakarta;
25. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia;
26. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
27. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
28. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
29. Badan Pelaksana Program Pusat PenINGKATAN Mutu SDM Kesehatan di Jakarta;
30. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan secara-paling.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS /DOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN  
ANGKATAN KE TUJUH BELAS TAHUN 2016  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

16

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPPT	STATUS PECAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROVINSI	PEMINATAN	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PEMERIKSAAN KEMBALI	KETERANGAN
I LULUS SELEKSI AKADEMIK												
1	dr. Danny Arya Kenana Nugraha	Medan, 1987-01-27	198701272010011013	PNS Kota Yogyakarta	Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	DIY	Ilmu Bedah	Januari 2016	II	RSU Kelas D Patama	
2	dr. Muhammad Singgih Nugraha	Klaten, 4 Maret 1983	538658	TNI Diaksesan	Dijen Kesehatan	Dijen Kesehatan Yogyakarta	KEMHAN	Ilmu Bedah	Julii 2016	I	KEMHAN	
3	dr. Mardib	Banjur Negara, 1987-05-24	198705252014031002	PNS Kab. Sanggau	Puskesmas Entikong	RSUD Sanggau - Dinkes Sanggau	KALBAR	Ilmu Bedah	Julii 2016	I	RSUD Sanggau	
4	dr. H. Donny Hendryanto	Padang, 1983-07-08	198307082010011018	PNS Kab. Padang Pariaman	Puskesmas Kayu Tanna	RSUD Sanggau - Dinkes Sanggau	SUMBAR	Ilmu Kesehatan THT	Julii 2016	I	RSUD Padang Pariaman	
5	dr. Siti Nurjanah	Jakarta, 1979-03-04	197903042005012007	PNS Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Baratar	Dinas Kesehatan Kota	JABAR	Ilmu Penyakit Paru	Julii 2016	I	RSUD Dr. Soekardjo	
6	dr. Sofasti	Blora, 1986-10-31	198610312011012007	PNS Kab. Blora	RSUD dr. R. Soetjono	RSUD dr. R. Soetjono Blora	JATENG	Obstetri dan Ginekologi	Julii 2016	I	RSUD dr. R. Soetjono Blora	
7	dr. Anne Marya	Bogor, 1980-02-19	198002192010012002	PNS Kab. Bogor	RSUD Cibinong	RSUD Cibinong	JABAR	Patologi Klinik	Julii 2016	I	RSUD Cibinong	
8	dr. Ellya Lathah Ilyas	Surakarta, 1985-05-01	198505012010012034	PNS Kota Surakarta	RSUD Kota Surakarta	RSUD Kota Surakarta	JATENG	Patologi Klinik	Julii 2016	I	RSUD Kota Surakarta	
9	dr. Ivan Paulus Gunata	Purwokerto, 23 Juni 1981	11110030810681	TNI Dikesead	Dijen Kesehatan	Dijen Kesehatan	KEMHAN	Patikatri	Julii 2016	I	KEMHAN	
10	dr. Eka Darsina	Pekabarni, 1981-01-15	198101152009032011	PNS Prov. Sumatera Barat	RSUD Achmad Mochtar	RSUD Achmad Mochtar	SUMBAR	Patikatri	Julii 2016	I	RSUD Achmad Mochtar	
11	dr. Muhammad Fajur Maulana Dimiyati	Solo, 1984-11-16	198411162010011010	PNS Kab. Padang Pariaman	PKM Kampung Dalam	Dinkes Padang Pariaman	SUMBAR	Patikatri	Julii 2016	I	RSUD Padang Pariaman	
II RESIDEN												
12	dr. Dhan Kabbandi	Mataram, 1983-05-14	198305142009041001	PNS Kab. Bima	RSUD Sondaia Kabupaten Bima	RSUD Sondaia Kabupaten Bima	NTB	Ilmu Kesehatan THT	Julii 2015	III	RSUD Sondaia Kabupaten Bima	
13	dr. Kartika Eka Pratiwi	Padang, 1978-10-14	197810142006042015	PNS Kab. Sumabawa Barat	UPTD Puskesmas Talawang	Dinkes Kab. Sumabawa Barat	NTB	Ilmu Penyakit Dalam	Januari 2016	II	RSUD Agr-Syifa	
14	dr. Emy Sriwahyuni Abdullah	Kendari, 1979-08-13	197908132008042001	PNS Prov. Jawa Timur	Rumah Sakit Jira Menur	Rumah Sakit Jira Menur	JATIM	Patikatri	Julii 2015	III	Rumah Sakit Jira Menur	
15	dr. Ria Adiani	Batuwangsa, 1982-09-12	198209122009012006	PNS Prov. Sumatera Barat	RSUD Dr. Achmad Mochtar	RSUD Dr. Achmad Mochtar	SUMBAR	Patikatri	Januari 2016	II	RSUD Dr. Achmad Mochtar	

